

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 2 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat	
	Anggaran BPBD Jabar Tersisa Rp 14 Miliar	<i>Pikiran Rakyat/ Hal. 4</i>
B	Kota Cimahi	
	PAD Parkir jauh dari Target	<i>Galamedia/Hal. 5</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Anggaran BPBD Jabar Tersisa Rp 14 Miliar

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 4

Edisi : Rabu, 2 September 2020

Anggaran BPBD Jabar

Tersisa Rp 14 Miliar

BANDUNG, (PR).-

Anggaran kegiatan dan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hanya tersisa Rp 13 miliar-Rp 14 miliar dari total anggaran yang sudah di-*refo-cusing* yaitu Rp 30 miliar. Sementara potensi bencana di Jabar bisa terjadi hingga akhir tahun nanti.

Kepala Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, pada praktiknya nanti tidak harus anggarannya dari BPBD semua karena sebagian peralatan ada di Dinas Bina Marga. Kemudian, jaminan hidup ada di Dinas Sosial dan kalau sampai kerawanan pangan ada lagi di Dinas Ketahanan Pangan yang stoknya bisa dua lapis.

"Ditambah lagi BTT (belanja tidak

terduga) juga *kan* bisa berkembang tergantung skala kebencanaannya. Jadi kalau untuk menghadapi bencana karena kita memiliki senjata pemungkas BTT itu akan kita gunakan," ujar Dani, Selasa (1/9/2020).

Adapun BTT itu setahun hanya Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Akan tetapi, setelah pandemi Covid-19 ini BTT menjadi Rp 5 triliun. Jadi sebenarnya bisa berapa pun BTT itu.

Hanya, tutur dia, BTT ini terus terang ada kelemahan yaitu hanya bisa dianggarkan dan dicairkan pada kondisi tanggap darurat. Artinya, bencana sudah terjadi sedangkan untuk menerbitkan keputusan gubernur mengenai tahap darurat itu butuh waktu.

"Belum lagi nanti penganggaran

dan pencairannya. Jadi sering kali biasanya kita tertinggal, bencana sudah terjadi tetapi anggaran masih berproses," katanya.

Sebetulnya, tambah dia, ada dana yang bisa cepat dikucurkan tetapi dari pusat namanya DSP (dana siap pakai). DSP ini sebenarnya kalau menurut undang-undang bisa dialokasikan juga di BPBD daerah. Namun, Mendagri mengatur lagi untuk digunakan di daerah itu tidak bisa jadi hanya BTT istilahnya.

"Kalau DSP lebih cepatnya karena ketika baru ada indikasi bencana atau peringatan artinya istilah kita siaga darurat itu sudah bisa dicairkan. Jadi masih siaga sudah bisa. Akan tetapi, kalau BTT sudah harus tanggap darurat," ujarnya.

BPBD Jawa Barat mencatat jumlah bencana alam di Jabar hingga akhir Juli 2020 cenderung turun. Selama 2019, jumlah bencana alam di Jabar tercatat 2.054 kejadian, sedangkan hingga Juli 2020 tercatat 971 bencana. Pada kedua periode tersebut, bencana didominasi longsor. "Tahun ini juga tidak ada korban jiwa dalam bencana alam hingga Juli 2020," katanya.

Menurut dia, bencana cenderung menurun selama tahun ini, biasanya tahun ke tahun alami kenaikan. "(Di tengah pandemi) Mungkin alam sekarang lebih bersahabat. Biasanya Januari hingga Maret hujan cukup intens dan curah hujan tinggi, tahun ini tidak terlalu banyak," ucap Dani. (Novianti Nurulliah)***

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : PAD Parkir jauh dari Target

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 5

Edisi : Rabu, 2 September 2020

Dishub Kota Cimahi Berpacu dengan Waktu

PAD Parkir Jauh dari Target

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 di Kota Cimahi, baru mencapai Rp 286 juta atau sekitar 57,24 persen dari target revisi tahun ini yakni Rp 500 juta.

Artinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi selaku penanggung jawab sektor retribusi tersebut hanya memiliki waktu empat bulan tersisa, untuk mencapai target yang tersisa sekitar Rp 213 juta atau 42,76 persen.

"Iya sisanya tinggal 42,76 persen lagi. Mudah-mudahan kekejar sampai Desember," kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi, Dessy Setawati, Selasa (1/9).

Penerimaan retribusi parkir tersebut didapat dari sekitar 89 titik parkir tepi jalan umum yang dikelola 120 juru parkir legal. Setoran yang diserahkan kepada Dishub Kota Cimahi dari juru parkir itu sebagai bentuk retribusi yang disesuaikan dengan potensi titik parkirnya, dan sudah disepakati dengan petugas parkir.

Sebetulnya, terang Dessy, target awal pendapatan dari sektor retribusi parkir di Kota Cimahi mencapai Rp 1,2 miliar. Target besar tersebut dicanangkan dengan asumsi tahun ini ada kenaikan tarif melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mustahil

Akan tetap revisi Perda tersebut belum rampung, sehingga sangat mustahil target Rp 1,2 miliar bisa tercapai jika tetap dipertahankan. Apalagi sejak mewabahnya pandemi virus korona, retribusi parkir pun otomatis menjadi menurun selama beberapa bulan.

"Sehingga kita revisi targetnya dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 500 juta. Cukup besar perubahannya memang," terang Dessy.

Karena Perda belum direvisi, otomatis tahun ini tarif parkir tepi jalan di Kota Cimahi masih menggunakan tarif lama. Tarif parkir sepeda motor saat ini Rp. 1.000, kendaraan roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 2.000. Angkutan barang jenis boks/pick up Rp. 2.500, tarif parkir truk/bus sedang Rp. 3.000.

Ia berharap dengan peningkatan aktivitas dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, pendapatan dari retribusi parkir semakin meningkat. Pihaknya juga mengimbau juru parkir dan konsumen tetap menerapkan protokol kesehatan

"Dengan penerapan AKB dimana sejumlah pusat kegiatan perdagangan mulai beroperasi kembali, kondisi parkir pun mulai meningkat lagi," tukas Dessy. **(B.110)****